

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya teknologi yang semakin pesat mendorong banyak organisasi melakukan transformasi digital. Transformasi digital yaitu serangkaian proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menanggapi perubahan yang terjadi di lingkungan mereka dengan merubah kegiatan operasional menggunakan teknologi digital. Salah satu bentuk teknologi digital adalah teknologi informasi (Vial, 2019). Transformasi digital telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau biasa disingkat DITJENPAS yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. DITJENPAS meluncurkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada tahun 2013. SDP merupakan bentuk perwujudan salah satu Misi DITJENPAS, yaitu “Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT”. Organisasi yang terdigitalisasi dengan baik akan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif, meningkatkan produktivitas, keterlibatan karyawan, serta meningkatkan pertumbuhan pendapatan organisasi (Attaran dkk., 2019). Dalam organisasi publik, penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dengan mengurangi waktu tunggu layanan, meningkatkan transparansi, dan menawarkan penyediaan layanan tanpa batas di seluruh organisasi (Lindgren dkk., 2019).

SDP merupakan mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan dalam bentuk pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi Pemasyarakatan. Data tersebut dilaporkan oleh petugas terkait atau *operator* mulai dari WBP memasuki Lapas/Rutan/LPKA, pembinaan, pembimbingan, hingga mereka bebas. Berdasarkan informasi dari Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2021), SDP merupakan solusi teknologi informasi komprehensif yang mencakup seluruh bisnis proses Pemasyarakatan. Ruang lingkup penggunaan SDP mulai dari Kantor Pusat DITJENPAS, Kantor

Wilayah, hingga UPT yang terdiri dari Lapas/Rutan/Bapas/Rupbasan yang ada di bawahnya.

SDP memiliki beragam fitur yang dapat memudahkan petugas untuk memberikan pelayanan pada narapidana ataupun dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan pada tiap-tiap satuan kerja. Database ini juga dapat dipergunakan dalam evaluasi program dan kinerja petugas, serta merupakan bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang Lapas/Rutan. Dengan adanya sistem yang mengatur segala bentuk informasi dari berbagai lapisan di dalam organisasi, maka akan terbentuk proses saling berbagi informasi yang efektif antar karyawan. Hal itu tentu akan meningkatkan pelayanan mereka. Sehingga secara umum, SDP dirancang untuk dapat mendukung kinerja atau *job performance* para petugas. *Job performance* sendiri merupakan serangkaian tindakan, perilaku, dan hasil pekerjaan dari petugas yang dapat diukur dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi (Viswesvaran & Ones, 2000). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *job performance* sebagai dampak dari penggunaan sebuah sistem dalam suatu organisasi.

Petugas yang terdiri dari Petugas Satuan Pengamanan, Petugas Pembinaan, Petugas Dukungan Teknis (DTK), dan Petugas Kesehatan diharapkan memiliki *job performance* yang tinggi untuk tetap dapat memberikan pelayanan yang maksimal walaupun di sisi lain sumber daya manusia yang dimiliki DITJENPAS sangatlah minim dibandingkan jumlah penghuni yang harus dilayani, yang mana seluruh Lapas yang ada mengalami *over capacity*. Menurut Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2021), dari 10 UPT dengan *over capacity* terbanyak di Indonesia, 7 di antaranya merupakan Lapas di Pulau Sumatera.

Tabel 1.1 Data Penghuni dan Petugas Lapas di Sumatera

Tahun	Jumlah Penghuni	Pertumbuhan	Jumlah Petugas	Pertumbuhan	Penghuni/Petugas
2016	74.848	Null	6.426	Null	12
2017	85.732	14,50%	7.169	11,50%	12
2018	95.369	11,20%	10.184	42,00%	9
2019	98.939	3,70%	11.611	14,00%	9
2020	117.828	19,00%	9.935	-14,50%	12
Rata-Rata	94.543	12,10%	9.065	13,25%	11

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2021) dan Diolah sendiri (2021)

Melihat karakteristik Pulau Sumatera yang terletak di perbatasan dan memiliki tingkat sensitivitas tinggi, tidak heran jika perbandingan jumlah petugas dan jumlah penghuni di Lapas Sumatera mencapai angka 1:11. Bahkan di tahun 2020, terdapat kenaikan penghuni mencapai 19% namun jumlah petugas menurun sebanyak 14,5%. Kurangnya petugas di Lapas Sumatera juga dipicu terbatasnya *recruitment* yang dilakukan oleh DITJENPAS. Fenomena tersebut menimbulkan penumpukkan pekerjaan dan tingginya tuntutan pelayanan pemasyarakatan di Pulau Sumatera, tidak terkecuali bagi Petugas Dukungan Teknis Lembaga Pemasyarakatan (DTK Lapas) yang terdiri dari bagian Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, Umum, Tata Usaha, serta Jabatan Fungsional Umum. SDP merupakan sebuah upaya peningkatan kinerja untuk menangani *slack* dari minimnya sumber daya manusia Lapas, di mana hal tersebut menjawab tuntutan pengondisian petugas yang ada.

Lapas merupakan realisasi dari Pasal 29 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan institusi terakhir di dalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaan putusan di pengadilan (hukuman). Lapas sebagai instansi terakhir dalam pembinaan Narapidana harus memperhatikan secara sungguh – sungguh hak dan kepentingan Narapidana. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020, kinerja petugas di Lapas Sumatera yang merupakan aparatur pemerintah di bidang pelayanan saat ini selalu menjadi sorotan tajam masyarakat. Hal ini terlihat dengan banyaknya keluhan dari masyarakat terutama mengenai sistem dan prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit (birokratis), jangka waktu pelayanan yang tidak berkepastian, informasi pelayanan yang kurang jelas, tidak transparan serta sikap dan perilaku aparatur

dalam memberikan pelayanan yang cenderung masih ingin dihormati maupun dilayani.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi maka sistem pelayanan dapat ditangani dengan komputerisasi, sehingga pelayanan masyarakat dapat lebih ditingkatkan dan kemungkinan penyimpangan administrasi dapat dihindarkan. Sistem administrasi dan manajemen yang terintegrasi dengan baik dapat membantu dalam pelaksanaan pemenuhan hak – hak narapidana seperti Remisi, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat. Melalui SDP Petugas Dukungan Teknis Lapas Sumatera dapat menjalankan fungsi pelayanan, manajemen registrasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, hingga konsolidasi data ke pusat. Hal tersebut dapat memperbaiki kurangnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak-hak WBP di masa lalu, yang mana terdapat arsip yang tersebar dan tidak terklasifikasi dengan baik, sehingga terjadi redudansi data dan lambatnya pencarian data narapidana. Sehingga diperlukan sistem yang dapat mengakomodir seluruh informasi berkaitan dengan proses pelayanan yang ada di Lapas.

Meskipun begitu, informasi yang dapat diakses melalui SDP belum sepenuhnya. Dalam Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2021), ditegaskan bahwa *“ada kemungkinan bahwa informasi yang tersedia dalam database ini mungkin berisi referensi/informasi yang belum terupdate sehingga tidak ada jaminan bahwa data dan informasi yang tersedia dalam kondisi akurat, lengkap, terkini atau pun sesuai untuk tujuan spesifik lainnya”*. Ditinjau dari Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2021), pada data bulan September tahun 2021, terdapat banyak Lapas dalam 10 KANWIL di Pulau Sumatera yang tidak sepenuhnya memperbarui atau melaporkan data yang dimiliki. Persentase Lapas Sumatera yang belum melakukan pelaporan pada SDP sejumlah 47%, yang memiliki nilai lebih tinggi daripada persentase Lapas Jawa yang belum melakukan pelaporan pada SDP sejumlah 32%. Seperti yang terlihat di Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, terlihat bahwa Lapas di Pulau Sumatera memiliki lebih banyak kekosongan data.

Fenomena tersebut menjelaskan alasan bahwa SDP belum dimanfaatkan secara optimal, yang kemudian dapat lebih memungkinkan permasalahan pemenuhan hak-hak WBP yang ada sebelum dilakukannya digitalisasi, masih terus berlanjut di Lapas Sumatera. Lapas yang ada di Sumatera letaknya masih berjauhan, bahkan banyak yang masih terisolasi, sehingga pembaharuan teknologi pun masih sulit untuk dilaksanakan dan dimanfaatkan secara penuh.

Tabel 1.2 Pelaporan Data Jumlah Penghuni Lapas Sumatera per 30 September 2021

Kanwil	Jumlah Lapas	Telah Lapor	Belum Lapor
Kanwil Bangka Belitung	5	3	2
Kanwil Bengkulu	4	0	4
Kanwil Jambi	9	2	7
Kanwil Kepulauan Riau	5	3	2
Kanwil Lampung	9	3	6
Kanwil Aceh	17	10	7
Kanwil Riau	11	3	8
Kanwil Sumatera Barat	14	10	4
Kanwil Sumatera Selatan	16	11	5
Kanwil Sumatera Utara	25	16	9
Jumlah	115	61	54
Persentase	100%	53%	47%

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2021) dan Diolah sendiri (2021)

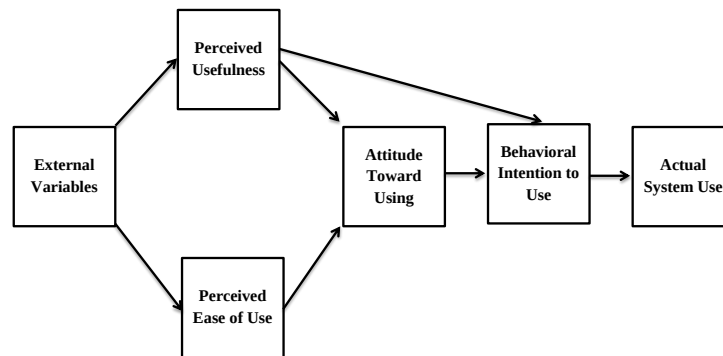
Tabel 1.3 Pelaporan Data Jumlah Penghuni Lapas Jawa per 30 September 2021

Kanwil	Jumlah Lapas	Telah Lapor	Belum Lapor
Kanwil Banten	8	5	3
Kanwil D.I Yogyakarta	4	2	2
Kanwil DKI Jakarta	4	3	1
Kanwil Jawa Barat	27	20	7
Kanwil Jawa Tengah	25	19	6
Kanwil Jawa Timur	24	14	10
Jumlah	92	63	29
Persentase	100%	68%	32%

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2021) dan Diolah sendiri (2021)

SDP yang belum sepenuhnya dimanfaatkan berkaitan dengan bagaimana penerimaan seluruh petugas atas system itu sendiri. Berdasarkan *Technology*

Acceptance Model yang dikembangkan oleh Davis (1989), penggunaan sebuah system ditentukan oleh dua faktor utama yaitu *perceived ease of use* dan *perceived usefulness*. Dengan demikian, digitalisasi organisasi harus diimbangi dengan pengelolaan sumber daya manusia yang nantinya akan menjadi pengguna sistem tersebut. Bagaimana pengguna akan menerima dan memanfaatkan suatu sistem didasarkan pada *perceived ease of use* atau sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem akan memerlukan sedikit atau bahkan tanpa *effort* sama sekali (Venkatesh, 2000). Serta *perceived usefulness* atau sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan sebuah sistem dapat membantu pekerjaan dan meningkatkan kinerja pekerjaan mereka (Salloum dkk., 2019).



Gambar 1.1 Technology Acceptance Model (TAM)

Lebih jauh lagi, penggunaan SDP didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Kemudian dibuatlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasyarakatan. Dengan demikian, penggunaan SDP bersifat *mandatory*, yang dalam praktiknya berkaitan dengan pembentukan *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* petugas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Andryzal Fajar (2017) disebutkan bahwa indikator dari *technology readiness* yang mempengaruhi *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* pengguna dalam penggunaan system yang bersifat *mandatory* adalah *optimism* dan *innovativeness*.

Dalam implementasi pada Petugas DTK Lapas Sumatera, terlepas penggunaan SDP yang tidak bersifat sukarela, mereka yakin bahwa SDP akan membantu seseorang menjadi lebih berguna, mereka juga memiliki motivasi intrinsik yang lebih kuat untuk menerima SDP dan bahkan menikmati sensasi mencoba sistem tersebut. Sifat optimis dan inovatif tersebut membangun persepsi petugas akan kemudahan dan kegunaan SDP, yang selanjutnya membentuk *behavioural intention to use* SDP. Penyelesaian tugas dengan menggunakan SDP dapat menjembatani Petugas DTK Lapas Sumatera memenuhi tuntutan kinerja yang sangat tinggi dari lingkungan pekerjaannya. Penelitian yang menyebutkan bahwa *perceived ease of use* berpengaruh pada *job performance* adalah (Islam dkk., 2021; Kositanurit dkk., 2006). Penelitian yang menyebutkan bahwa *perceived usefulness* berpengaruh pada *job performance* adalah (Islam dkk., 2021; Bravo & Ostos, 2017).

Kedua persepsi petugas tersebut tidak hanya ditentukan oleh *technology readiness* yang dimiliki petugas dalam proses penerimaan system, namun terdapat factor eksternal yang juga ikut berperan dalam membentuk *perceived ease of use* dan *perceived usefulness*. Fakfor tersebut berkaitan dengan sifat system itu sendiri, yang mana berkenaan dengan *system quality* dan *information quality* yang mereka terima. *System quality* mencakup komponen perangkat lunak dan data yang digunakan, serta merupakan ukuran sejauh mana sistem tersebut secara teknis berjalan dengan baik (Gorla dkk., 2010). *Information quality* merupakan sejauh mana pengguna menerima informasi yang lengkap, tepat, cepat, relevan, terbaru, dan dapat mempermudah pekerjaan pengguna melalui penggunaan sebuah sistem (Salloum dkk., 2019). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif *system quality* terhadap *perceived ease of use* (Salloum dkk., 2019; Gupta dkk., 2021; Priyanto & Ramadhan, 2019) dan *perceived usefulness* (Cheng, 2020; Mahmodi, 2017) serta pengaruh positif *information quality* terhadap *perceived ease of use* (Salloum dkk., 2019; Gupta dkk., 2021; Priyanto & Ramadhan, 2019) dan *perceived usefulness* (Cheng, 2020; Leon, 2018; Salloum dkk., 2019; Priyanto & Ramadhan, 2019). Ketika sebuah sistem berjalan dengan baik dan memberikan

informasi yang sesuai, maka pengguna akan merasa bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan berguna bagi mereka.

Tidak hanya memiliki pengaruh pada kedua persepsi tersebut, *system quality* dan *information quality* sebagai karakteristik system juga memiliki dampak atas penggunaan sebuah sistem pada *job performance*. Penelitian yang menunjukkan bahwa *system quality* atau kualitas pemrosesan sistem itu sendiri berpengaruh pada *job performance* penggunanya yaitu (Mohamed Ali & Younes, 2013; Dahleez dkk., 2020; Kositanurit dkk., 2006; Permana & Setianto, 2018). Dalam konteks pekerjaan Petugas DTK Lapas Sumatera, *system quality* yang dimaksud yaitu kelancaran proses input data registrasi dan sidik jari WBP, keberhasilan melakukan pengajuan remisi, serta kesuksesan untuk mengakses seluruh data dan fiturnya. SDP bertujuan untuk membangun Database Napi/Tahanan Nasional, sehingga kelancaran proses pengelolaan informasi mulai dari pengumpulan hingga pengkomunikasian data dari seluruh unit kerja menjadi sangat penting. Selain itu, penelitian yang menyatakan bahwa *job performance* juga dipengaruhi oleh *information quality* atau kualitas informasi yang dihasilkan sebuah sistem yang digunakan penggunanya yaitu (Mohamed Ali & Younes, 2013; Dahleez dkk., 2020; Permana & Setianto, 2018). Dalam konteks pekerjaan Petugas DTK Lapas Sumatera, *information quality* yang dimaksud seperti kesesuaian data diri dan catatan WBP, selain itu juga kesesuaian jumlah penghuni dan kapasitas kamar dengan keadaan sebenarnya, Sesuai dengan tujuan dibangunnya SDP, *information quality* merupakan salah satu fokus utama yang dapat menunjang pengambilan keputusan, serta meningkatkan pelayanan petugas.

Sejauh ini, banyak ditemukan penelitian yang menguji peran mediasi *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* pada pengaruh *system quality* dan *information quality* terhadap *job performance*, namun didapatkan hasil yang beragam atau tidak konsisten. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, didapati hasil *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* mampu memediasi pengaruh *system quality* dan *information quality* terhadap *job performance* secara penuh (Chirchir dkk., 2019), ada pula yang menyatakan bahwa mediasi bersifat

partial atau sebagian (Dahleez dkk., 2020; Mohamed Ali & Younes, 2013), serta didapati pula temuan bahwa kedua variabel belum mampu memediasi (Permana & Setianto, 2018). Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas pengaruh sistem informasi pada kinerja, masih belum banyak ditemukan penelitian serupa yang dilakukan dalam ranah Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, belum banyak pula yang menguji peran mediasi *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* dalam konteks penggunaan SDP di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini akan menguji Petugas DTK Lapas di Sumatera yang tersebar di 10 Kanwil dan 115 Lapas di dalamnya.

Melihat keadaan jumlah Petugas DTK Lapas di Sumatera yang tidak memadai, disertai dengan penilaian pelayanan oleh masyarakat yang kurang baik, petugas memiliki tantangan untuk bekerja lebih ekstra. Namun di sisi lain, kurangnya pemanfaatan SDP di Lapas Sumatera yang mulanya diharapkan dapat membantu pekerjaan petugas dan bagaimana dampaknya pada kinerja mereka belum terukur secara baik. Dengan mengacu pada fenomena yang ada, penelitian ini menguji bagaimana pengaruh pemanfaatan SDP bagi kinerja Petugas DTK Lapas Sumatera berkenaan dengan kualitas sistem, kualitas informasi, serta persepsi mereka akan kemudahan dan kegunaan SDP. Atau dengan kata lain, penelitian ini mendalami bagaimana peran mediasi *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* Petugas DTK Lapas Sumatera pada pengaruh *system quality* dan *information quality* SDP terhadap *job performance* mereka. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“PERAN MEDIASI *PERCEIVED EASE OF USE* DAN *PERCEIVED USEFULNESS* PADA PENGARUH *SYSTEM QUALITY* DAN *INFORMATION QUALITY* TERHADAP *JOB PERFORMANCE*”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *System Quality* berpengaruh terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera?
2. Apakah *Information Quality* berpengaruh terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera?

3. Apakah *Perceived Ease of Use* berpengaruh terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera?
4. Apakah *Perceived Usefulness* berpengaruh terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera?
5. Apakah *System Quality* berpengaruh terhadap *Perceived Ease of Use* Petugas DTK Lapas Sumatera?
6. Apakah *Information Quality* berpengaruh terhadap *Perceived Ease of Use* Petugas DTK Lapas Sumatera?
7. Apakah *System Quality* berpengaruh terhadap *Perceived Usefulness* Petugas DTK Lapas Sumatera?
8. Apakah *Information Quality* berpengaruh terhadap *Perceived Usefulness* Petugas DTK Lapas Sumatera?
9. Apakah *Perceived Ease of Use* memediasi pengaruh *System Quality* terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera?
10. Apakah *Perceived Ease of Use* memediasi pengaruh *Information Quality* terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera?
11. Apakah *Perceived Usefulness* memediasi pengaruh *System Quality* terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera?
12. Apakah *Perceived Usefulness* memediasi pengaruh *Information Quality* terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh *System Quality* terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera
2. Untuk menguji pengaruh *Information Quality* terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera
3. Untuk menguji pengaruh *Perceived Ease of Use* terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera
4. Untuk menguji pengaruh *Perceived Usefulness* terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera

5. Untuk menguji pengaruh *System Quality* terhadap *Perceived Ease of Use* Petugas DTK Lapas Sumatera
6. Untuk menguji pengaruh *Information Quality* terhadap *Perceived Ease of Use* Petugas DTK Lapas Sumatera
7. Untuk menguji pengaruh *System Quality* terhadap *Perceived Usefulness* Petugas DTK Lapas Sumatera
8. Untuk menguji pengaruh *Information Quality* terhadap *Perceived Usefulness* Petugas DTK Lapas Sumatera
9. Untuk menguji peran mediasi *Perceived Ease of Use* pada pengaruh *System Quality* terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera
10. Untuk menguji peran mediasi *Perceived Ease of Use* pada pengaruh *Information Quality* terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera
11. Untuk menguji peran mediasi *Perceived Usefulness* pada pengaruh *System Quality* terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera
12. Untuk menguji peran mediasi *Perceived Usefulness* pada pengaruh *Information Quality* terhadap *Job Performance* Petugas DTK Lapas Sumatera

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis mengacu pada pengaruh penelitian ini pada sisi ilmiah, sedangkan manfaat praktis mengacu pada pengaruh penelitian ini pada pemanfaatannya bagi organisasi. Kedua manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memberi sumbangsih pengetahuan pada bidang organisasi dan sumber daya manusia terutama mengenai pengaruh *System Quality* dan *Information Quality* terhadap *Job Performance* dengan *Perceived Ease of Use* dan *Perceived Usefulness* sebagai variabel mediasi.

2. Bagi akademisi, hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang dapat memperbaiki serta menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat membantu Lapas di wilayah Sumatera dalam meningkatkan *Job Performance* petugasnya dengan mengadopsi sistem informasi yang berkaitan dengan *System Quality*, *Information Quality*, *Perceived Ease of Use*, dan *Perceived Usefulness*.
2. Penelitian ini dapat menjadi rujukan referensi ilmiah organisasi lain terkait pentingnya *System Quality*, *Information Quality*, *Perceived Ease of Use*, *Perceived Usefulness*, dan *Job Performance* bagi keberlangsungan organisasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada sebuah penelitian merupakan gambaran langkah yang dilalui penulis dalam melakukan pembahasan yang komprehensif. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai uraian kelima variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *system quality*, *information quality*, *perceived ease of use*, *perceived usefulness*, dan *job performance* sebagai acuan teoritis dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang ada. Selain itu, bab ini juga berisikan pembahasan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi atas dilakukannya penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, identifikasi variabel, jenis data, sumber data, definisi operasional, skala pengukuran, subjek penelitian, teknik analisis data, serta pengujian hipotesis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum akan objek penelitian yang digunakan, deskripsi data, analisis data, serta pembahasan hasil dari penelitian ini.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan atas seluruh pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dari penulis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan dan menentukan langkah selanjutnya.